

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Desa (Studi Kasus Desa Lubuk Pauh Kabupaten Kerinci Antis Kantesa)

Antis Kantesa^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: antiskontesa@gmail.com

Received 1 Februari 2026

Revised 10 Februari 2026

Accepted 20 Februari 2026

Available online 8 Maret 2026

Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan perlindungan sosial pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui mekanisme bantuan sosial bersyarat. Program ini dirancang untuk mendorong keluarga penerima manfaat agar lebih aktif memanfaatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Pauh, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, pendamping PKH, perangkat desa, keluarga penerima manfaat (KPM), serta masyarakat yang tidak menerima bantuan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam indikator utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Lubuk Pauh telah berjalan dan memberikan dampak positif dalam membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat keterbatasan pemutakhiran data, keterbatasan jumlah pendamping PKH, koordinasi antar lembaga yang belum efektif, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap kewajiban program.

Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemutakhiran data sosial secara berkala, penguatan kapasitas pendamping PKH, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi program secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan, Perlindungan Sosial, Pengentasan Kemiskinan, Desa Lubuk Pauh

Abstract

The Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) is one of the Indonesian government's flagship social protection policies aimed at reducing poverty and improving the welfare of low-income households. The program adopts a conditional cash transfer mechanism that encourages beneficiary families to access essential public services such as education and health care. This study aims to analyze the implementation of the PKH policy in Lubuk Pauh Village, Kerinci Regency. The research employs a qualitative approach using a case study method to explore how the policy is implemented at the village level and identify the challenges encountered during its implementation. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving several stakeholders, including officials from the Social Affairs Office of Kerinci Regency, PKH facilitators, village officials, beneficiary families (KPM), and non-beneficiary community members. The analysis is based on the policy implementation model developed by Van Meter and Van Horn, which emphasizes six key variables influencing policy implementation: policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, socio-economic and political conditions, and implementers' disposition. The findings indicate that the PKH implementation in Lubuk Pauh Village has contributed positively to alleviating the economic burden of poor households, particularly in improving access to education and health services. However, several challenges remain, including inaccurate targeting of beneficiaries due to outdated data, limited number of facilitators, weak coordination among implementing actors, and insufficient understanding among beneficiaries regarding program obligations. These issues affect the overall effectiveness of policy implementation at the local level. Therefore, strengthening institutional coordination, improving the

accuracy of social welfare data, enhancing facilitator capacity, and increasing community awareness are essential to ensure that the PKH program can be implemented more effectively and sustainably in rural communities.

Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program, Social Protection Policy, Poverty Alleviation, Rural Governance

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi persoalan tersebut, salah satunya melalui kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ekonomi semata, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Salah satu program utama dalam kebijakan perlindungan sosial di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. PKH mendorong keluarga penerima manfaat untuk memastikan anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang layak serta mengakses layanan kesehatan secara rutin.

Kemiskinan di wilayah pedesaan masih menjadi persoalan yang cukup serius. Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kerinci mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih memerlukan intervensi kebijakan yang efektif.

Di Kecamatan Gunung Tujuh, khususnya di Desa Lubuk Pauh, terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah keluarga penerima bantuan PKH. Data menunjukkan bahwa dari 289 penduduk miskin di desa tersebut, hanya sekitar 25 keluarga yang tercatat sebagai penerima bantuan PKH. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan PKH diimplementasikan di tingkat desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan PKH di tingkat desa menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterapkan dalam konteks lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Pauh Kabupaten Kerinci dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan PKH di Desa Lubuk Pauh.

Lokasi penelitian berada di Desa Lubuk Pauh Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. Desa ini dipilih karena memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi tetapi jumlah penerima PKH relatif sedikit.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan seperti pendamping PKH, aparat desa, serta keluarga penerima manfaat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Pauh yang berada di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada kategori menengah ke bawah serta menjadi salah satu wilayah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, berdasarkan data yang tersedia, terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk miskin dan jumlah keluarga penerima manfaat PKH di desa tersebut, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat desa.

Secara geografis, Desa Lubuk Pauh terletak di kawasan dataran tinggi di kaki Gunung Kerinci dengan ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menjadikan wilayah tersebut memiliki iklim yang relatif sejuk serta lahan yang cukup subur untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sebagian besar wilayah desa terdiri dari lahan pertanian dan permukiman masyarakat yang tersebar di beberapa wilayah dusun.

Masyarakat Desa Lubuk Pauh pada umumnya menggantungkan kehidupan ekonomi pada sektor pertanian. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi sawah, tanaman hortikultura seperti sayuran, serta beberapa jenis komoditas perkebunan. Kondisi ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada hasil pertanian menjadikan sebagian rumah tangga berada dalam kondisi ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas maupun perubahan kondisi alam.

Berdasarkan data desa, sekitar dua puluh persen masyarakat Desa Lubuk Pauh masih berada dalam kategori keluarga miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial dari pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), memiliki peran yang cukup penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Lubuk Pauh

Secara umum, struktur ekonomi masyarakat Desa Lubuk Pauh masih didominasi oleh sektor agraris. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dengan mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber utama penghasilan keluarga. Pendapatan masyarakat sangat bergantung pada hasil panen yang diperoleh setiap musim, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung fluktuatif. Meskipun sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian desa, tingkat kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin. Berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat desa dan pendamping PKH, jumlah penduduk miskin di Desa Lubuk Pauh mencapai sekitar 289 jiwa. Namun demikian, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan hanya sebanyak 25 keluarga. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah masyarakat yang menerima bantuan PKH.

Kesenjangan tersebut menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat terkait ketepatan sasaran program. Sebagian masyarakat menilai bahwa masih terdapat keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. Sebaliknya, terdapat pula anggapan bahwa beberapa penerima bantuan dianggap kurang layak untuk menerima bantuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pendataan dan penentuan penerima manfaat masih menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaksanaan.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan di sektor non-pertanian menyebabkan masyarakat memiliki pilihan ekonomi yang relatif terbatas. Hal ini turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga dengan lahan pertanian yang sempit atau bahkan tidak memiliki lahan sendiri.

Kondisi geografis wilayah yang berada di kawasan dataran tinggi juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan yang lebih memadai di wilayah perkotaan terdekat.

Dengan kondisi sosial ekonomi yang demikian, keberadaan program bantuan sosial dari pemerintah menjadi salah satu instrumen penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.

B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Pauh

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan sosial bersyarat yang berkaitan dengan pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Di Desa Lubuk Pauh, pelaksanaan PKH melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran masing-masing dalam proses implementasi program. Pihak-pihak tersebut antara lain Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, pendamping PKH, aparat pemerintah desa, serta masyarakat penerima bantuan yang tergabung dalam kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pendamping PKH memiliki peran yang cukup penting dalam proses pelaksanaan program di tingkat desa. Pendamping bertugas untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat, memberikan sosialisasi mengenai tujuan dan kewajiban program, serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Melalui kegiatan tersebut, keluarga penerima manfaat diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pendidikan anak, kesehatan keluarga, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, pendamping PKH juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat penerima manfaat. Pendamping bertugas untuk menyampaikan berbagai informasi terkait program, termasuk mekanisme pencairan bantuan serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat.

C. Peran Pendamping PKH dalam Pelaksanaan Program

Pendamping PKH merupakan aktor kunci dalam implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Di Desa Lubuk Pauh, pendamping PKH bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat agar mereka dapat memahami dan menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan program.

Pendamping melakukan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi program, pendampingan administrasi, serta monitoring terhadap kewajiban keluarga penerima manfaat. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pendamping yang tersedia masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah keluarga yang harus didampingi. Kondisi ini menyebabkan intensitas pendampingan yang dilakukan belum sepenuhnya maksimal.

Keterbatasan jumlah pendamping juga berdampak pada proses monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban keluarga penerima manfaat, seperti kewajiban memastikan anak tetap bersekolah serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

D. Pengalaman Masyarakat Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat, sebagian besar masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan Program Keluarga Harapan. Bantuan yang diberikan dinilai dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan keluarga.

Sebagian masyarakat menyatakan bahwa bantuan PKH digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah anak, seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, serta kebutuhan pendidikan lainnya. Selain itu, bantuan tersebut juga membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil maupun balita.

Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tujuan utama dari program PKH. Beberapa keluarga penerima manfaat masih memandang PKH hanya

sebagai bantuan tunai dari pemerintah, tanpa memahami bahwa bantuan tersebut memiliki syarat dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan edukasi mengenai program masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami secara lebih komprehensif tujuan dan mekanisme program PKH.

E. Kendala dalam Implementasi Program PKH

Meskipun program PKH telah memberikan manfaat bagi masyarakat, implementasinya di Desa Lubuk Pauh masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masalah ketepatan sasaran penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima PKH. Di sisi lain, terdapat persepsi di masyarakat bahwa sebagian penerima bantuan dinilai kurang tepat sasaran.

Permasalahan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan pemutakhiran data dalam sistem pendataan kesejahteraan sosial yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Data yang belum sepenuhnya akurat menyebabkan proses penentuan penerima manfaat tidak selalu sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Selain itu, keterbatasan jumlah pendamping PKH juga menjadi kendala dalam proses implementasi program. Pendamping harus menangani wilayah yang cukup luas dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang relatif banyak. Hal ini menyebabkan proses pendampingan tidak dapat dilakukan secara intensif kepada seluruh keluarga penerima manfaat.

Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Meskipun koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan Dinas Sosial telah dilakukan, namun dalam praktiknya komunikasi antar pihak masih belum berjalan secara optimal.

F. Dampak Program PKH bagi Masyarakat

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Lubuk Pauh. Program ini membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Keberadaan PKH juga mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Banyak keluarga penerima manfaat yang menjadi lebih termotivasi untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah.

Di bidang kesehatan, program ini turut meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, seperti pemeriksaan kesehatan ibu hamil serta pemantauan kesehatan balita.

Meskipun demikian, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, pelaksanaan program PKH masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam hal pemutakhiran data penerima manfaat, peningkatan kapasitas pendamping, serta penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Pauh, Kabupaten Kerinci. Hasil penelitian diperoleh melalui proses wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi yang melibatkan berbagai informan, antara lain aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, pendamping PKH, perangkat desa, keluarga penerima manfaat (KPM), serta masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Pauh telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

G. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Pauh dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, pendamping PKH, pemerintah desa, serta bank penyalur bantuan. Secara umum, mekanisme pelaksanaan PKH diawali dengan proses penentuan calon penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Setelah calon penerima ditetapkan, proses selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pendamping PKH bersama dengan pihak pemerintah desa. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam kebijakan PKH. Setelah proses verifikasi selesai, keluarga yang telah ditetapkan sebagai KPM akan menerima bantuan sosial melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Selain penyaluran bantuan sosial, pendamping PKH juga memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Salah satu bentuk kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam kegiatan ini, pendamping memberikan edukasi kepada KPM mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan keuangan keluarga.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendampingan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah pendamping yang harus menangani wilayah dampingan yang cukup luas. Akibatnya, intensitas pendampingan kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal.

H. Kendala dalam Implementasi Program PKH

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Pauh. Salah satu kendala utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh keterbatasan pemutakhiran data. Data penerima bantuan yang tidak selalu diperbarui secara berkala menyebabkan masih adanya keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program. Jumlah pendamping PKH yang terbatas menyebabkan proses pendampingan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi program juga dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Dari aspek sosial, masih terdapat kecemburuan sosial di masyarakat terkait penentuan penerima bantuan. Kondisi ini muncul karena adanya persepsi bahwa proses penentuan penerima bantuan tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban dalam program PKH juga masih perlu ditingkatkan. Beberapa keluarga penerima manfaat belum sepenuhnya memahami bahwa bantuan yang diberikan memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Pauh, Kabupaten Kerinci dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Model ini menekankan enam variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana.

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan indikator awal yang menentukan arah implementasi suatu program. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan utama kebijakan ini adalah

meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan sosial bersyarat yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini juga dirancang untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih memperhatikan pendidikan anak dan kesehatan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tujuan program PKH telah dipahami oleh para pelaksana kebijakan di tingkat lokal, termasuk pendamping PKH dan aparat desa. Program ini dinilai memberikan kontribusi positif dalam membantu keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian, implementasi tujuan kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal di Desa Lubuk Pauh. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaksesuaian antara jumlah keluarga miskin dengan jumlah penerima bantuan PKH. Data menunjukkan bahwa dari total 289 penduduk miskin di Desa Lubuk Pauh, hanya 25 keluarga yang tercatat sebagai penerima manfaat program. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan program belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan.

Selain itu, sebagian masyarakat penerima bantuan masih memandang PKH hanya sebagai bantuan finansial semata, tanpa memahami sepenuhnya bahwa program ini merupakan bantuan bersyarat yang memiliki kewajiban tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan jelas dalam regulasi, pemahaman masyarakat terhadap tujuan program masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Pauh, sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, serta ketersediaan data yang akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam implementasi PKH adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah pendamping PKH. Pendamping memiliki peran strategis dalam menjalankan berbagai tugas, seperti melakukan sosialisasi program, mendampingi keluarga penerima manfaat, serta memastikan bahwa kewajiban program dilaksanakan dengan baik. Namun, jumlah pendamping yang terbatas menyebabkan proses pendampingan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan lain yang ditemukan adalah terkait dengan akurasi data penerima bantuan. Program PKH menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Akan tetapi, data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Akibatnya, masih terdapat keluarga miskin yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang dinilai kurang layak namun tetap menerima bantuan. Keterbatasan sumber daya ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana bantuan, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia serta kualitas sistem pendataan yang digunakan.

C. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Karakteristik lembaga pelaksana juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan PKH di Desa Lubuk Pauh, terdapat beberapa aktor yang terlibat, antara lain Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, pendamping PKH, serta pemerintah desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural lembaga pelaksana telah memiliki pembagian tugas yang jelas. Dinas Sosial berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program di tingkat daerah, sementara pendamping PKH bertugas melakukan pendampingan langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program, terutama dalam proses pendataan dan verifikasi kondisi masyarakat. Namun dalam praktiknya, kapasitas kelembagaan di tingkat desa masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pemahaman

terhadap mekanisme program serta kemampuan dalam melakukan verifikasi data secara objektif. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa faktor kedekatan sosial atau hubungan personal dapat mempengaruhi proses penentuan penerima bantuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa karakteristik sosial dan budaya di tingkat desa juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

D. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, terutama dalam program yang melibatkan berbagai institusi seperti PKH. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan dapat disampaikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pemerintah desa telah berlangsung secara rutin melalui berbagai kegiatan koordinasi. Pendamping PKH juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan pertemuan kelompok serta kegiatan pendampingan lainnya. Namun demikian, komunikasi yang terjadi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa informan menyatakan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat.

Keterbatasan komunikasi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara utuh tujuan program PKH serta mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, peningkatan intensitas komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.

E. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat juga mempengaruhi implementasi kebijakan PKH di Desa Lubuk Pauh. Desa ini merupakan wilayah pedesaan dengan karakteristik ekonomi agraris, di mana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani.

Ketergantungan terhadap sektor pertanian menyebabkan pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil, sehingga sebagian masyarakat berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan. Kondisi ini menjadikan program bantuan sosial seperti PKH sangat penting dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Namun demikian, kondisi sosial masyarakat juga dapat mempengaruhi persepsi terhadap program bantuan sosial. Dalam beberapa kasus, muncul kecemburuan sosial di antara masyarakat yang tidak menerima bantuan. Hal ini biasanya terjadi ketika terdapat perbedaan persepsi mengenai kelayakan penerima bantuan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Disposisi Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor terakhir yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen, pemahaman, serta sikap para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan, terutama pendamping PKH, memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Pendamping berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat serta membantu mereka memahami tujuan program.

Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya serta beban kerja yang cukup besar menjadi tantangan bagi para pelaksana dalam menjalankan tugas secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta dukungan kelembagaan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Pauh telah memberikan kontribusi positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Pauh Kabupaten Kerinci, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut pada dasarnya telah berjalan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat penerima manfaat. Program ini berperan dalam membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bantuan sosial yang diberikan melalui PKH juga mendorong keluarga penerima manfaat untuk lebih memperhatikan pendidikan anak serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya layanan kesehatan.

Namun demikian, implementasi kebijakan PKH di Desa Lubuk Pauh belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa. Dari aspek standar dan tujuan kebijakan, program PKH secara normatif telah memiliki tujuan yang jelas dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh keterbatasan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan jumlah dan kapasitas pendamping PKH menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan, monitoring, dan edukasi kepada masyarakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, karakteristik lembaga pelaksana di tingkat desa juga mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan, terutama dalam hal koordinasi dan keterlibatan perangkat desa dalam proses pendataan dan pengawasan program.

Aspek komunikasi antar organisasi menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, dan pemerintah desa telah berlangsung, namun masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan kewajiban program juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagian keluarga penerima manfaat masih memandang PKH hanya sebagai bantuan tunai, tanpa memahami sepenuhnya kewajiban yang melekat pada program tersebut.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Pauh telah memberikan dampak positif dalam upaya pengentasan kemiskinan, tetapi masih memerlukan berbagai perbaikan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, serta pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., Isdijoso, W., & Fatah, A. R. (2019). Program bantuan sosial di Indonesia: Evaluasi kebijakan perlindungan sosial. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Kerinci dalam angka 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci.
- Barrientos, A. (2013). Social assistance in developing countries. Cambridge University Press.
- Bappenas. (2020). Strategi nasional penanggulangan kemiskinan. Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional.

- Bappenas. (2022). Laporan pembangunan Indonesia: Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Devereux, S., & Sabates-Wheeler, R. (2004). Transformative social protection. IDS Working Paper, 232, 1–26.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Handayani, T., & Rahayu, N. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 87–99.
- Hastuti, H., et al. (2018). Program Keluarga Harapan: Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. SMERU Research Institute.
- Kabeer, N. (2014). Social protection and poverty reduction. *International Development Journal*, 26(5), 659–671.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Program Keluarga Harapan: Kebijakan dan implementasi perlindungan sosial*. Kementerian Sosial RI.
- Kusuma, A., & Prasetyo, B. (2020). Analisis implementasi kebijakan bantuan sosial bersyarat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 33–45.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Offset.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy: Teori kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, A., & Lestari, S. (2022). *Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam pengentasan*

- kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(3), 221–234.
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.
- Putri, R., & Wardhana, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 120–132.
- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press.
- Saputra, H., & Kurniawan, B. (2021). Evaluasi implementasi Program Keluarga Harapan di daerah pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 45–59.
- Subarsono, A. G. (2016). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial*. Refika Aditama.
- Suryahadi, A., Sumarto, S., & Pritchett, L. (2003). *The evolution of poverty during the crisis in Indonesia*. SMERU Working Paper.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI Bandung.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wibawa, S. (2011). *Politik perumusan kebijakan publik*. Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. CAPS.
- World Bank. (2020). *Conditional cash transfers and poverty reduction: Lessons from developing countries*. World Bank Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.